

Pengaruh Penerapan SIMAKDA, SPI, dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Roshani

Politeknik Negeri Sambas

hani.poltesa11@gmail.com

Abstract: *This study is to analyze whether the implementation of regional accounting management information systems, internal control systems, and human resource competencies affect the quality of the West Kalimantan Province SKPD report. The sample of this study was conducted by using purposive sampling method. The samples of data used in this study were 40 people. Research data and hypotheses in this study were analyzed using multiple linear regression analysis methods. The results of this study indicated that simultaneous regional accounting management information systems, internal control systems, and human resource competencies significantly influence the quality of regional government financial reports. Meanwhile partially, the internal control system does not significantly influence the quality of regional government financial reports, while the regional accounting management information system and internal control system significantly influence the quality of regional government financial reports.*

Keywords: *SIMAKDA, SPI, SDM*

1. Pendahuluan

Salah satu langkah menuju desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya adalah pengaturan kabupaten/provinsi dengan tujuan meningkatkan layanan, memberdayakan masyarakat, sehingga meningkatkan keterlibatan masyarakat guna mempercepat pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Dengan disahkannya Undang-Undang No 3 2004 mengenai Pembentukan instansi kabupaten/provinsi serta Undang-Undang No 33 2004 mengenai kestabilan *finance* instansi tinggi dan instansi kabupaten/provinsi, menjadi merubah yang signifikan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pelaporan keuangan instansi kabupaten/provinsi menjadi sarana instansi guna menjadi tanggu jawab pengelolaan dana yang dikeluarkannya untuk pemerintahan pada suatu periode waktu tertentu. Kualitas *Accounting* Instansi No 71 2010 harus diikuti dalam mengelola pelaporan *finance* instansi. Meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas adalah tujuan dari penerapan hal ini. Meskipun saat ini terdapat luas diskusi tentang standar pelaporan *finance*, ada banyak contoh laporan keuangan pemerintah daerah yang masih kurang bagus di Indonesia sehingga memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Evaluasi yang kompeten atas informasi dalam pelaporan *finance* guna penentuan apa hasil tersebut wajar tidak menjamin bahwa laporan tersebut bebas dari penipuan (Wulandari & Rahmat, 2020)

Aturan instansi No 71 2010 menyatakan bahwa relevansi, diandalkan, bisa diperbandingkan, mudah dimengerti, sehingga bisa mengedepankan transparan serta akuntabilitas merupakan sifat-sifat yang masih kurang dimiliki oleh fenomena pelaporan *finance* instansi Indonesia. Hasil pemantauan instansi menunjukkan adanya kerugian daerah sebesar Rp. 2 t, sudah diselesaikan dari cicilan sebesar Rp187 m, melunasi sebesar Rp731 m, sehingga hapus buku sebesar Rp8,87 m, dan sisanya ditanggung instansi kawasan sebesar Rp 1,07 t. Temuan analisis Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia kepada pelaporan keuangan instansi kabupaten/provinsi tahun 2018 memperlihatkan hal tersebut.

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Daerah (SIMAKDA), memberikan pelaporan informasi pendanaan yang didapatkan disaat memproses berdasarkan pemasukan yang benar, standar menjadi bagus dan menghasilkan yang baik menjadi poin pendukung mendapatkan hasil pelaporan dana keuangan yang baik. Sistem informasi keuangan daerah menjadi ketentuan jaringan yang mencatat, menatausahakan, dan menghasilkan informasi aliran pendanaan daerah dan data lain yang terikat sehingga hasil informasi dapat diberikan dan dilihat manusia diluar instansi saat memberikan keputusan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Untuk mencapai kategori instansi daerah ketika laporan keuangannya berkualitas, hal ini setara dengan penyusunannya harus dilakukan oleh sumber daya yang didukung oleh pelaksanaan Keuangan Daerah Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) teknologi sehingga tujuan menyajikan sesuai waktu, lengkap, mencapai akurat pelaporan pendanaan daerah pada setiap periodenya (Sulila, 2019).

Menurut PP no. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah harus menciptakan dan mendapatkan keberlangsungan digitalisasi komunikasi guna memperlancar proses pengaliran dan pelaporan pendanaan untuk pengambilan keputusan internal. (Presiden Republik Indonesia, 2005)

Karena membangun lingkungan pengendalian yang baik, mengavaluasi potensi risiko, melaksanakan kegiatan mengendalikan wujud dan tugas pengelolaan berkas rahasia lainnya, serta memastikan bahwa sosialisasi mengalir dengan bebas, SPI juga berdampak pada kuantitas pelaporan pendanaan dan mengawasi seluruh prosedur pendanaan sekaligus akuntansi yang dikerjakan seseorang akuntansi dalam pelaporan pendanaan. SPI menjadi prosedur dalam merangkul manajemen dalam merancang memperoleh kepercayaan memenuhi dalam mencapai kemanjuran, tepat guna, kepatuhan menghadapi persyaratan hukum yang relevan, dan keandalan penyajian laporan keuangan (Sutrisna et al., 2022).

Salah satu unsur terpenting dalam menghasilkan pelaporan pendanaan dalam memperoleh nilai sosialisasi tinggi sehingga mendapatkan untuk dijalankan dengan kepentingan-kepentingan yang memerlukan akses terhadap data pelaporan pendanaan menjadi kemampuan SDM, dimana penyusunan pelaporan pendanaan, sejauh kita tahu dengan proses paling krusial bagi suatu organisasi untuk menentukan kinerjanya dari waktu ke waktu, SPI dan SIMAKDA tidak akan berfungsi dengan baik jika kompetensi staf akuntansi kurang baik dan efisien sehingga tidak mampu mengasilkan pelaporan pendanaan menjadi informasi berkualitas tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca. seseorang yang berkompeten tentunya adalah seseorang yang berkualitas tinggi, memahami akuntansi dan keuangan, serta telah mengenyam pendidikan dibidangnya (ningsih irna, 2022).

Tujuan penelitian dilakukan dapat melihat SIMAKDA, SPI, dan Kompetensi SDM dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerapan SIMAKDA, SPI, dan SDM sebagai sarana dalam aspek keuangan untuk pemerintah daerah sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Nurillah, 2019), (riawan, 2016), (Saipullah, 2017), (Gunadi, 2017), (Sanjaya, 2017), dan (Faishol, 2020), menyatakan bahwa pemanfaatan prosedur accounting pemerintah, pengendali dalam perusahaan, dan SDM memiliki ikatan tinggi kepada laporan keuangan daerah, begitu telah dilakukan oleh (ihsanti, 2014) dan (Susanti, 2020) menerangkan peluang SDM, sistem informasi akuntansi pemerintah daerah tidak memiliki ikatan kepada laporan keuangan daerah.

2. Kajian Pustaka

2.1. Sistem Informasi Akuntansi

SPI menjadi kumpulan dokumen, menulis, serta melaporan yang disusun dan dikoordinasikan guna memberikan manajemen data *finance* diperlukan untuk mendukung manajemen bisnis (Hamidy et al., 2022). Menurut PP Nomor 192 Tahun 2014 menyatakan bahwa sistem menjadi standar sehingga memberikan bantuan dalam kegiatan tata usaha instansi daerah menjadi setinggi provinsi, mencapai desa. (Presiden Republik Indonesia, 2014). Namun sistem informasi aliran keuangan berupa alat yang mencatat, menatausahakan, pengaliran dana daerah serta dokumen lain yang terikat berubah informasi sebagai hal yang patut untuk disampaikan kepada manusia luar untuk menjadi proses dalam memberikan keputusan untuk mencapai tujuan sesuai PP No 56 2005 tentang.

SPI menjadi kumpulan teknologi berbentuk komputer dimaksudkan guna menyatukan, mengolah, menulis, dan memproses data kegiatan guna memberikan hasil yang akan diberikan kepada pihak dalam dan luar instansi, sesuai dengan gagasan yang dikemukakan di atas. Penggunaan teknologi dimulai dengan mengumpulkan, memilah, menulis, sehingga kegiatan pendanaan pemerintah menjadi bentuk pelaporan pendanaan berupa hasil nantinya dapat dipergunakan orang-orang terpilih memperoleh putusan oleh masih OPD berupa kegiatan membuat pelaporan *finance* instansi disebut dengan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi keuangan wilayah daerah.

2.1.1 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Bentuk pelaporan *finance* instansi kabupaten/provinsi sedikit mempengaruhi pemakai teknologi keterangan, bentuk pelaporan *finance* instansi kabupaten/provinsi mempengaruhi dengan cara langsung penggunaan *website* informasi. Pemanfaatan majunya jaringan perlu dimaksimalkan guna pengembangan bidang sistem informasi manajemen menjadi kegiatan pengerjaan menjadi mungkin pemerintah melakukan pekerjaan sesuai terintegrasi berkaitan kerjasama sesama dunia kerja guna membantu memberikan pelaporan *finance* yang karakteristiknya memenuhi persyaratan (Chodijah & Hidayah, 2020)

2.2. Sistem Pengendalian Internal

SPI adalah perihal menjadi penting guna meningkatnya pelaporan keuangan sehingga dirapikan dengan masing-masing bidang instansi. SPI sudah penuh kegunaanya perhal memberi kepercayaan memenuhi mengenai andal pelaporan *finance*, patuh kepada peraturan perundang-undangan, sehingga efektif dan efisien kegiatan (Rahmansyah & Darwis, 2020). Salah satu elemen yang menghasilkan pelaporan keuangan berkualitas tinggi adalah kerangka pengendalian internal. Sesuai dengan komite prosedur audit institut akuntan public amerika (AICPA), kendalian dalam instansi berupa perencanaan satuan kerja serta teknik penindakan agar dimanfaatkan oleh pelaku bisnis guna menjaga asetnya dan memverifikasi ketepatan dan keandalan informasi akuntansinya (Faishol, 2020).

Operasional instansi daerah akan dipengaruhi oleh sistem pengawasan internal suatu organisasi, terlepas dari apakah organisasi tersebut merupakan entitas publik atau bukan. Pengawasan guna mencegah, pengawasan deteksi awal, sehingga pengawasan guna memperbaiki merupakan tiga jenis fungsi pengendalian internal.

2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan internalisasi rutin dapat terjamin tercapai keinginan pembangunan tertentu. (Chodijah & Hidayah, 2020). SPI merupakan kegiatan berarti yang harus tetap dilaksanakan untuk kepala serta semua anggota staf guna mendapatkan jaminan serta memenuhi syarat dalam pencapaian keinginan instansi melewati operasi guna efisien serta efektif, laporan

aliran keuangan yang akurat, keamanan barang serta kepatuhan pada hukum dan aturan. Tujuan dari sistem pengawasan internal guna menyerahkan jaminan guna cukup bagi keberhasilan serta efisien capaian keinginan organisasi.

2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pada beberapa instansi perihal agar sangat berarti agar dapat memperhatikan SDM agar jadi bantuan pokok mencapai keinginan instansi. Meningkatkan SDM bisa pemerintah maupun perusahaan swasta sudah selayaknya perusahaan memperhatikan kualitas SDM, harus menggerakkan secara efektifitas dan efisiensi sehingga memiliki peningkatan hasil terbaik.

Sutrisno (2017) menyatakan kemampuan suatu dilandaskan kepada keahlian serta ilmu agar disokong dari perilaku kerja disertai penerpannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan”.

Kemampuan memahami atau mengasalkan pekerjaan yang berprestasi di tempat kerja merupakan salah satu tanda kompetensi. Kompetensi menjadi kualitas yang dimiliki seorang individual berupa pengetahuan. Nurillah (2014) seorang tenaga kerja adalah manusia dimana keingintahuan, *skills*, serta kecakapan orang agar bisa diterapkan guna memperoleh pelayanan maksimal.

Menurut definisi di atas, tenaga profesional mengacu pada aspek mendalam dari kepribadian yang tertanam dalam diri seseorang yang perilakunya diharapkan dalam kaitannya dengan tugas dan lingkungan pekerjaan. Ciri berupa standar agar dimanfaatkan guna menilai orang apakah dapat berkerja secara baik atau tidak, namun menetapkan peningkatan kemampuan digunakan guna memastikan keefektifan peningkatan kerja sesuai keinginan.

2.3.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Waktu yang diperlukan untuk menyusun pelaporan *finance* dapat berkurang ketika tersedia SDM berkualitas. Perihal itu karena asal kekuatan yang disebut dapat mendapatkan ilmu serta memahami agar diperlukan untuk menyelesaikan proses penyusunan dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (Sutrisna et al., 2022)

2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan *finance* dapat digambarkan sebagai data dan kompilasi informasi. Laporan keuangan dibuat sesuai dengan aturan No 13 2006 yang mengungkapkan terkait informasi mengenai status *finance* serta segala kegiatan agar dilaksanakan kepada instansi dalam (satu) waktu laporan disediakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Pelaporan terealisasi penganggaran menjabarkan ringkasan asal, alokasi, serta penggunaan uang agar diproses instansi pusat/daerah agar melukiskan bandingan terkait taksiran serta realisasi taksiran selama waktu pelaporan. Faktor guna mencakup terkait langsung kepada pelaporan realisasi anggaran mulai dari pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan
2. Neraca
Aset, kewajiban, dan dana ekuitas suatu entitas dijelaskan dalam neraca terhadap waktu khusus.
3. Laporan Arus Kas
Pelaporan aliran kas memberikan informasi awal, pendapatan, beban, serta saldo akhir kas instansi pusat atau daerah selagi waktu tertentu. Ini juga mencakup informasi tunai terkait pinjaman, investasi pada barang *non finance* serta transaksi non anggaran
4. CALK
Keterangan naratif agar spesifik angka agar dapat dilihat pada pelaporan aliran kas, neraca, dan pelaporan relisasi anggaran dicantumkan dalam CALK. Kebijakan *accounting* agar

diterapkan kepada perusahaan lapor serta informasi lainnya agar diamanatkan serta disarankan guna dilaporkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia (SPIP) juga dituangkan dalam CALK.

Baridwan (1992:17) pada (Andini, 2016) mengungkapkan pelaporan *finance* daerah merupakan singkatan pada sesuatu tahapan penulisan kegiatan-kegiatan *finance* agar kegiatan waktu periode tahunan buku bersangkutan.

3. Metode Penelitian

Metode kajian menggunakan metode Kuantitatif dimana digunakan untuk menganalisis Pengaruh Penggunaan SIMAKDA, SPI, dan SDM pada Kualitas LKPD. Kuantitatif merupakan teknik penelitian berbasis positivism termasuk pengumpulan data melalui penggunaan alat kajian, menganalisis data kuantitatif statistik, dan studi kepada populasi serta sampel beberapa yang digunakan guna memeriksa prasangka (Sugiyono, 2022)

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di SKPD Provinsi Kalimantan Barat. Adapun sebab penulis melakukan penelitian ini dikarenakan hendak memperoleh gambaran dan bukti empiris tentang pengaruh penggunaan SIMAKDA, SPI, dan kompetensi SDM pada kualitas LKPD.

Data Primer merupakan dokumen untuk dikumpul dari penulis secara langsung pada asal utama serta bagian objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2022) primer pada kajian ini didapatkan melalui Observasi dan Kuesioner. Sedangkan sekunder adalah data yang di dapatkan dari pihak ke tiga (Sugiyono, 2022) data sekunder pada kajian ini merupakan jumlah SDM provinsi kalimantan barat memakai teknologi SIMAKDA.

Populasi pada kajian merupakan seseorang telah menjalankan pada bagian *finance* pada SKPD Provinsi Kalimantan Barat. Berhubung variabel dilakukan penulis merupakan SDM menggunakan langsung pada bagian *finance* pada satuan kerja instansi daerah, supaya tidak semua SDM berada di SKPD Provinsi Kalimantan Barat bisa di jadikan responden guna menjawab kuesioner yang dibagikan. Sehingga pada ciri mengambil sampel ini merupakan staf bekerja pada bagian *finance*. Pada kajian ini penulis mendapatkan sampel sejumlah 40 staf koordinator keuangan di SKPD Provinsi Kalimantan Barat.

Varibel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penulis gunakan pada kajian merupakan *independent variabel* serta *dependent variabe*). *Independent variabel* pada kajian merupakan SIMAKDA, SPI dan Kompetensi SDM, sementara *dependent variabel* merupakan LKPD.

Metode Analisis Data

Pada kajian penulis menggunakan analisis data berupa kegiatan mengolah dokumen sehingga gampang dimengerti serta dipahami. Guna analisis data, memerlukan dokumen tepat sehingga mendapat hasil untuk bisa digunakan pada kajian. Analisis data diproses guna memproses data jadi informasi, data jadi gampang dimengerti serta menerikan manfaat guna menyelesaikan masalah berkaitan pada aktifitas kajian ini.

Skala Pengukuran

Skala Likert merupakan alat ukur yang digunakan dalam pengukuran ini. Seperti yang diungkapkan oleh Siregar, (2014) dapat digunakan untuk mengukur keyakinan seseorang, status keuangan, dan pemahaman terhadap suatu hal atau masalah beberapa sehingga skala Likert pada kajian ini memilik 5 (lima) alternatif jawaban pada masing-masing pertanyaan kuesioner diberikan pada responden. Lima alternatif jawaban itu akan membuat poin, yaitu:

Tabel 1. Measurement Scale

Alternatif	Bobot
SS	Lima
S	Empat
KS	Tiga
TS	Dua
STS	Satu

Sumber: Data Olahan, 2022

Teknik Analisis Data

Kajian ini teknik analisis menggunakan pengujian Instrumen meliputi pada validitas pengujian dan reliabilitas pengujian. Asumsi klasik pengujian terdiri pada pengujian normalitas, pengujian multikolinieritas, pengujian heteroskedastisitas dan pengujian hipotesis meliputi pada pengujian regresi linier berganda, pengujian koefisien determinasi (R^2), pengujian parsial, pengujian simultan.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Hasil uji validitas item-item penerapan SIMAKDA, SPI, dan SDM bisa dipahami pada hasil pengujian dibawah ini

Tabel 2. Uji Validitas SIMAKDA, SPI, dan SDM

No	Item		Correlation		Hasil
	Pertanyaan	Results	5%	r tabel	
1	P1	,689	,312	Sah	
2	P2	,648	,312	Sah	
3	P3	,601	,312	Sah	
4	P4	,629	,312	Sah	
5	P5	,420	,312	Sah	
6	P6	,471	,312	Sah	
7	P7	,452	,312	Sah	
8	P8	,381	,312	Sah	
9	P9	,554	,312	Sah	
10.	P10	,610	,312	Sah	
11.	P11	,486	,312	Sah	
12.	P12	,437	,312	Sah	
13.	P13	,373	,312	Sah	
14.	P14	,450	,312	Sah	
15.	P15	,420	,312	Sah	
16.	P16	,382	,312	Sah	

17.	P17	,472	,312	Sah
18.	P18	,595	,312	Sah
19.	P19	,518	,312	Sah
20.	P20	,672	,312	Sah
21.	P21	,689	,312	Sah
22.	P22	,588	,312	Sah
23.	P23	,781	,312	Sah
24.	P24	,738	,312	Sah
25.	P25	,436	,312	Sah
26.	P26	,452	,312	Sah
27.	P27	,338	,312	Sah
28.	P28	,588	,312	Sah
29.	P29	,764	,312	Sah
30.	P30	,828	,312	Sah
31.	P31	,787	,312	Sah
32.	P32	,457	,312	Sah

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Hasil tes validitas terhadap semua item SIMAKDA, SPI dan Kompetensi SDM adalah valid (r hitung $>$ r tabel) ketika nilai signifikan 5% sehingga mendapatkan kesimpulan agar semua kuesioner pertanyaan menjadi valid dan dapat dilanjutkan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Item Pertanyaan	Hasil Korelasi (r_{xy})	r tabel 5%	Kesimpulan
1	P33	,690	,312	Sah
2	P34	,441	,312	Sah
3	P35	,560	,312	Sah
4	P36	,551	,312	Sah
5	P37	,468	,312	Sah
6	P38	,380	,312	Sah
7	P39	,524	,312	Sah
8	P40	,482	,312	Sah

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Hasil tes validitas terhadap item kualitas LKPD adalah valid (r hitung lebih besar r tabel) pada taraf signifikans 5% menyimpulkan bahwa semua kuesioner pertanyaan menjadi valid dan dapat dilanjutkan untuk analisis selanjutnya

Uji Realibilitas

Hasil tes reliabilitas item-item sistem informasi manajemen akuntansi daerah, Sistem pengendalian internal, sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Alfa Cronbach
1.	SIMAKDA	,765
2.	SPI	,685
3.	SDM	,854
4.	LKPD	,578

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Hasil tes reliabilitas penerapan sistem informasi manajemen akuntansi daerah sebesar ,765, penerapan sistem pengendalian internal sebesar ,753 dan sumber daya manusia sebesar ,586 lebih besar dari ,60 sehingga item-item pertanyaan tersebut reliabel.

Uji Normalitas

Data dapat dikatakan normal ketika nilai pada pengujian lebih besar dari ,05 sehingga data tersebut dapat normal. Pada tabel di bawah dapat diketahui hasil uji normalitas:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters	Mean	-
	Std. Deviation	1,82376984
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,076
	Negative	-,083
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Hasil uji normalitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Dapat dilakukan tindak lanjut data ketika nilai pada pengujian uji multikolinieritas tidak melebihi 10 sehingga dapat dilakukan pengujian tindak lanjut. Pada tabel di bawah dapat dilihat hasil uji multikolinieritas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig	Tolerance	VIF
1 (konstant)	25.138	6.347		3.961	.000		
SIMAKDA	296	.094	.462	3.161	.003	.903	1.108
SPI	134	.112	.176	1.200	.238	.900	1.111
SDM	-241	.102	-.342	-2.363	.024	.920	1.086

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Pengujian multikolinieritas di atas sehingga dapat dilakukan tindak lanjut bahwa data yang diuji tidak mengalami multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Dapat melihat suatu memiliki masalah heteroskedastisitas atau tidak dapat dilihat dari nilai sig. Jika nilai LKPD melebihi ,05 maka masalah heteroskedastisitas tidak terjadi. Pada tabel di bawah dapat dilihat tes heteroskedastisitas:

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
1 (konstant)	-4,411	3,272		-1,348	,186
SIMAKDA	,036	,048	,125	,747	,460
SPI	,021	,058	,062	,370	,713
SDM	,071	,053	,224	1,354	,184

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Dari tes heteroskedastisitas di atas dapat diperoleh bahwa data yang diuji tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Hasil uji analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
1 (konstant)	25.138	6.347		3.961	.000
SIMAKDA	296	.094	.462	3.161	.003
SPI	134	.112	.176	1.200	.238
SDM	-241	.102	-.342	-2.363	.024

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Hasil uji regresi linier berganda pada tabel di atas menunjukkan bahwa , persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 25,138 + 0,296 \text{ SIMAKDA} + 0,138 \text{ SPI} - 0,241 \text{ SDM} + e$$

$\beta_0 = 25,138$ memberikan hasil dengan nilai SIMAKDA (X_1), SPI (X_2), dan SDM (X_3) menjadi kosong, maka LKPD adalah sebesar 25,138.

$\beta_1 = ,296$ memberikan hasil dengan nilai SIMAKDA (X_1), SPI (X_2), dan SDM (X_3) menjadi kosong, membuat poin kenaikan SIMAKDA (X_1) membuat menurunkan laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar ,296.

$\beta_2 = ,134$ memberikan hasil dengan nilai SIMAKDA (X_1), SPI (X_2), dan SDM (X_3) menjadi kosong, membuat poin kenaikan SPI (X_2) membuat penurunan laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar ,134.

$B_3 = -,241$ memberikan hasil dengan nilai SIMAKDA (X_1), SPI (X_2), dan SDM (X_3) menjadi kosong, membuat poin kenaikan SDM (X_3) membuat penurunan laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar -,241.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Dibawah ini dapat dilihat hasil tes koefisien determinan (R^2) sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.554 ^a	.307	.249	1.89824

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Hasil uji koefisien determinan (R^2) pada tabel di atas memperlihatkan poin koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* senilai 0,249 atau 24,9%. Menunjukkan kebersamaan SIMAKDA, SPI dan SDM sama-sama saling mempengaruhi LKPD sejumlah 24,9% persen. Nilai *Std,Error of the Estimate* sebesar 1.89824 dimana semangkin kecil hasil *Std,Error of the Estimate* akan membuat model regresi semangkin tepat ketika meramalkan variabel terikat.

Uji Parsial (Uji t)

Dibawah ini dapat di ketahui hasil tes parsial :

Tabel 10. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
1 (konstant)	25.138	6.347		3.961	.000
SIMAKDA	.296	.094	.462	3.161	.003
SPI	.134	.112	.176	1.200	.238
SDM	-.241	.102	-.342	-2.363	.024

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

Untuk mengetahui t_{tabel} maka $t(0,025;40-3-1) = 36$ maka di peroleh t_{tabel} senilai 2,028. Tes parsial mendapatkan hasil sistem informasi manajemen akuntansi daerah memiliki t_{hitung} sebesar 3,161 lebih besar dari t_{tabel} 2,028, sementara itu nilai signifikansi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Daerah sebesar ,003 lebih turun dari ,05.

Uji Simultan (Uji f)

Tes simultan dilakukan untuk melihat SIMAKDA, SPI, SDM secara bergandengan terhadap LKPD. Di bawah ini dapat dilihat poin hasil tes simultan:

Tabel 11. Hasil Uji f

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1 Regresi	57.381	3	19.127	5.308	.004 ^a
Residual	129.719	36	3.603		
Total	187.100	39			

Sumber: Data Olahan SPSS, 2022

tes f memperoleh poin f_{hitung} senilai 5,308 melebihi dari f_{tabel} 2,86 dan nilai signifikansi f sebesar 0,004 lebih turun dari 0,05.

SIMAKDA Mempengaruhi Terhadap Kualitas LKPD

Hasil pengujian terhadap H1 pertama mendapatkan SIMAKDA mempengaruhi secara positif serta signifikansi pada kualitas LKPD dalam Provinsi Kalimantan Barat. Menjadikan perolehan analisis pada penggunaan *SPSS 23* memperlihatkan pada perolehan pengujian t variabel penerapan SIMAKDA pada Kualitas LKPD menunjukkan senilai t_{hitung} senilai 3.161 ketika membandingkan pada t_{tabel} 2.028 sehingga didapatkan t_{hitung} lebih besar $t_{tabel} = 3.161 > 2.028$, sedangkan signifikan SIMAKDA senilai ,003 ketika membandingkan pada $\alpha = 5\%$ sehingga mendapatkan ,003 kurang dari 0,05 sehingga mendapatkan kesimpulan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Daerah mempengaruhi positif serta signifikansi pada Kualitas LKPD artinya meningkatnya SIMAKDA akan membuat meningkat pula Kualitas LKPD. Temuan dari kajian di atas senada pada kajian sebelumnya mengungkapkan SIMDA mempengaruhi positif pada kualitas LKPD (Sulila, 2019) pada demikian, temuan tersebut mendapat dukungan perolehan pada kajian ini mengungkapkan SIMAKDA mempengaruhi positif serta signifikansi pada Kualitas LKPD.

SPI Tidak Mempengaruhi Terhadap Kualitas LKPD

Pengujian terhadap H2 memperlihatkan SPI tidak mempengaruhi signifikan pada Kualitas LKPD di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasar pengujian pada *SPSS 23* menunjukkan perolehan pengujian parsial. Sistem Pengendalian Internal (X2) pada Kualitas LKPD (Y) yang dimana hasil t_{hitung} senilai 1,200 ketika membandingkan pada t_{tabel} 2.028 sehingga menghasilkan t_{hitung} lebih kecil dari $t_{tabel} = 1,200 < 2.028$, sedangkan hasil signifikan SPI senilai ,238 apabila dibandingkan dengan $\alpha = 5\%$ maka memperoleh ,238 meningkat dari 0,05 sehingga memperoleh SPI tidak mempengaruhi signifikan pada LKPD. Hasil kajian ini tidak konsisten pada kajian telah dilakukan (Faishol, 2020) menyatakan SPI mempengaruhi signifikansi pada kualitas LKPD.

SDM Mempengaruhi Terhadap Kualitas LKPD

Pengujian terhadap H3 memperlihatkan kompetensi SDM mempengaruhi signifikansi pada Kualitas LKPD di Provinsi Kalimantan Barat. Dari perolehan analisis pengujian menggunakan *SPSS 23* menghasilkan pengujian parsial variabel Kompetensi SDM (X3) pada LKPD (Y) yang dimana nilai signifikannya sebesar 0,024 kurang dari ,05 dan t_{hitung} senilai -2,363 lebih dari t_{tabel} senilai 2.028 sehingga mendapatkan kesimpulan agar Kompetensi SDM mempengaruhi signifikan pada Kualitas LKPD. Temuan dari kajian ini tidak mendukung kajian dari (Susanti, 2020) mengemukakan hasil kapasitas SDM tidak mempengaruhi signifikansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan instansi. Perolehan kajian ini senada pada kajian dilakukan (Nurillah, 2019) mengungkapkan kompetensi SDM mempengaruhi positif serta signifikansi pada kualitas LKPD. Hal itu dikarenakan pada sejumlah sumber daya manusia yang diposisikan pada bagian *finance* sedikit pada sisi total serta pada sisi rumpun ilmu masih kurang.

5. Kesimpulan

Sebelumnya sudah dikemukakan hasil serta pembahasannya, sehingga memperoleh kesimpulan bahwa SIMAKDA mempengaruhi positif serta signifikansi pada Kualitas LKPD pada Provinsi Kalimantan Barat sehingga memiliki arti ketika pemakaian pada SIMAKDA semakin bagus sehingga dapat menaikkan Kualitas LKPD. Namun SPI tidak mempengaruhi signifikansi pada Kualitas LKPD di Provinsi Kalimantan Barat sehingga memiliki arti keterandalan LKPD tidak tergantung dari SPI. Sedangkan Kompetensi SDM mempengaruhi signifikansi pada Kualitas LKPD di Provinsi Kalimantan Barat yang artinya bahwa ketika staf *finance* memiliki kuantitas bagus sehingga perihal ini juga memberikan dampak Laporan *Finance* Pemerintah Daerah yang di dapatkan. Adapun saran untuk kajian selanjutnya menambahkan jumlah variabel penelitian, mengembangkan dan memperbaiki instrumen pertanyaan dalam kuesioner dan menambah objek penelitian sehingga dapat mengembangkan hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Andini. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi KLAT*, 26(1), 33–41.
- Chodijah, S., & Hidayah, N. (2020). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 34–48. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2595>
- Faishol, A. (2020). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN). I(3), 205–212.
- Gunadi, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa). *Skripsi*, 1–15. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13058>
- Hamidy, F., Surahman, A., & Famelia, R. H. (2022). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Apotek Menggunakan Metode MPKP (FIFO). *Jurnal Tekno Kompak*, 16(2), 188–199.
- ihsanti. (2014). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota).
- ningsih irna. (2022). THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM AND HUMAN RESOURCE COMPETENCE ON QUALITY LOCAL. 11(03), 1525–1536.
- Nurillah, as syifa. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *JOM FEKON Universitas Diponegoro*, 1–70.
- Presiden Republik Indonesia. (2005). *Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah*.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *peraturan presiden republik indonesia nomor 192 tahun 2014 tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan*.
- Rahmansyah, A. I., & Darwis, D. (2020). Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Internal Terhadap Penjualan (Studi Kasus : Cv. Anugrah Ps). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(2),

- 42–49. <https://doi.org/10.33365/jtsi.v1i2.388>
- riawan. (2016). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Dengan SIMDA Pada SKPD Kabupaten Buton Utara*. *JESP-Vol.8*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um002v8i12016p050>
- Saipullah, L. (2017). *Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraib Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*.
- Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 71.
- Siregar. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perbitungan manual dan spss*. kencana.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sugiyono (ed.); cetakan ke).
- Sulila, I. (2019). The Effect of Human Resource Competency and Implementation of SIMDA on the Quality of Financial Statement at BPKAD Office of Gorontalo City. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.67-74.2019>
- Susanti, F. (2020). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul)*. 1–15.
- Sutrisna, M., Nadirsyah, N., & Indayani, I. (2022). The Effect of Human Resource Competence, Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, and Application of Government Accounting Standards on The Quality of Financial Reporting (Study on South Aceh Government SKPK). *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 3(3), 124–134. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v3i3.311>
- sutrisno. (2017). *manajemen sumber daya manusia* (cetakan pe). kencana.
- Wulandari, A. M., & Rahmat, D. (2020). *THE IMPLEMENTATION OF A REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM, HUMAN RESOURCE COMPETENCY, AND INTERNAL CONTROL SYSTEM, ON THE QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS (Case Study: SKPD Kota DKI Jakarta)*. 1–21. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/2782>